

Katalog BPS. 9302003.3513

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Menurut Pengeluaran 2014 - 2018

*BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PROBOLINGGO*



Katalog BPS. 9302003.3513

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Menurut Pengeluaran 2014 - 2018

*BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PROBOLINGGO*



<https://probolinggokab.bps.go.id>



**Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Probolinggo
Menurut Pengeluaran 2014-2018**

Katalog BPS : 9302003.3513
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : vii + 63 halaman

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Wilayah

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik
Kabupaten Probolinggo

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor serta Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Probolinggo, September 2019

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Probolinggo,

BAGUS SUNGGONO, SE., MM.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	2
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	5
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	10
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	16
2.5 Perubahan Inventori	19
2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	21
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PROBOLINGGO BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN 2014-2018	23
3.1 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran	24
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran.....	32
3.2.1 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	32
3.2.2 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	37
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	38
3.2.4 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	42
3.2.5 Perkembangan Perubahan Inventori	43
3.2.6 Perkembangan Ekspor	44
3.2.7 Perkembangan Impor	46

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN	
	KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2014-2018	48
4.1	PDRB (Nominal)	49
4.2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	50
4.3	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB.....	51
4.4	Perbandingan PDRB terhadap Impor.....	52
4.5	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan.....	52
4.6	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	53
4.7	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	54
	PENUTUP	56
	LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018	25
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018	26
Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018	28
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018.....	30
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018	31
Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018.....	31
Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018	33
Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018	35
Tabel 9. Pertumbuhan Riil Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018	36
Tabel 10. Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018	37
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPR T Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018	38
Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018	39
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018.....	42
Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018	44
Tabel 15. Perkembangan Ekspor Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018	45
Tabel 16. Perkembangan Impor Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018	46

Tabel 17.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 – 2018	49
Tabel 18.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo, Tahun 2014-2018.....	50
Tabel 19.	Rasio Ekspor Terhadap PMTB Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 – 2018	51
Tabel 20.	Rasio PDRB Terhadap Total Impor Kabupaten Probolinggo, Tahun 2014-2018.....	52
Tabel 21.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Probolinggo, Tahun 2014-2018.....	53
Tabel 22.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Probolinggo, Tahun 2014-2018.....	54
Tabel 23.	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Kabupaten Probolinggo, Tahun 2014-2018.....	55

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018	25
Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018	27
Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018	28
Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018.....	29
Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018	30

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2014 – 2018...	59
Tabel 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2014 – 2018.....	60
Tabel 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 – 2018.....	61
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018	62
Tabel 5.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 – 2018	63
Tabel 6.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 – 2018.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

<https://probelinggotkab.bps.gb.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

- Disebut sebagai pendekatan “riil”

- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (*final output*)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur, atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah pada setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah :

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun dasar 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS provinsi maupun BPS kabupaten/kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah :

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada :

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah :

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit, dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan

tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *International Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4. Perubahan Inventori	5. Perubahan Inventori
5. Ekspor	6. Ekspor
6. Impor	7. Impor

<https://probelinggokab.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut :

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu :

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb :

1. Nilai pengeluaran konsumsi per kapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb :

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumahtangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah :

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan DPPKAD
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia

- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan DPPKAD
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} -$$

$$\text{Penjualan barang dan jasa} +$$

$$\text{Social transfer in kind purchased market production} +$$

$$\text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut :

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang

dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

1. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
1. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- b. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- c. Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- d. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- e. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- f. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- g. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- h. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHE}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung :

Pendekatan Supply : $\text{PMTB atas dasar harga Berlaku} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi : $\text{PMTB atas dasar harga Konstan (t)} = \text{PMTB atas dasar harga (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan

baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;

4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}$$

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6. **EKSPOR - IMPOR**

i **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang

memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan


Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.



BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO
BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
2014 -2018**

<http://probolinggo.kab.bps.go.id>

Aktivitas pembangunan ekonomi di kabupaten Probolinggo selama periode 2014 sampai dengan 2018 telah mengakibatkan pergeseran struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Probolinggo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Adapun untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2100 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Perekonomian kabupaten Probolinggo selama tahun 2014-2018 menunjukkan tanda peningkatan. Hal ini terlihat dari nilai pertumbuhan ekonominya yang selalu menunjukkan arah positif atau terjadi peningkatan. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan 2010 (ADHK), serta pertumbuhan total. Secara total PDRB adhb kabupaten Probolinggo pada periode 2014- 2018 meningkat sebesar 38,40 persen, yakni dari 23.157,98 miliar Rupiah di tahun 2014 menjadi 32.049,78 miliar Rupiah pada tahun 2018. Sedangkan jika dinilai atas dasar harga konstan 2010 (adhk), maka peningkatan ini jauh lebih rendah, yakni dari 18.682,21 miliar Rupiah (tahun 2014) menjadi 22.375,24 miliar Rupiah (tahun 2018), atau meningkat sebesar 19,77 persen. Nilai PDRB kabupaten Probolinggo adhb selama periode tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut tentunya dipengaruhi oleh adanya perubahan volume dan juga perubahan harga.

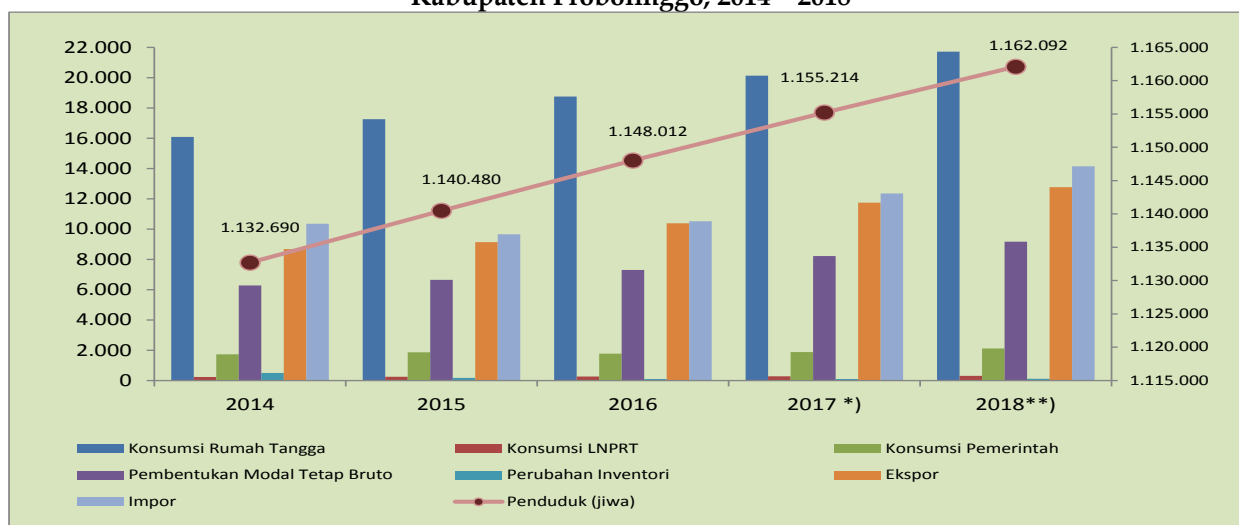
Pada periode tahun 2014 - 2018 PDRB kabupaten Probolinggo atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 23.157,98 miliar Rupiah (2014); 25.688,56 miliar Rupiah (2015); 28.067,42 miliar Rupiah (2016); 29.991,63 miliar Rupiah (2017); dan 32.049,78 miliar Rupiah (2018). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB adhb menurut komponen pengeluaran kabupaten Probolinggo pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini :

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014-2018
Table 1. GRDP at Current Price by Expenditure, Probolinggo Regency 2014-2018

(Miliar Rp./Billion Rp.)

Komponen Pengeluaran/ Expenditure Item	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption	16.080,78	17.258,13	18.753,47	20.133,46	21.718,25
2. Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption	232,02	241,40	259,60	273,35	303,28
3. Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption	1.736,93	1.868,72	1.771,64	1.874,07	2.122,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	6.277,26	6.654,36	7.304,36	8.215,13	9.165,96
5. Perubahan Inventori/ Changes of Inventory	506,45	180,76	98,86	106,00	117,39
6. Ekspor/Export	8.672,62	9.141,87	10.390,39	11.745,33	12.762,36
7. Impor/Import	10.348,08	9.656,69	10.510,91	12.355,72	14.139,82
Total PDRB	23.157,98	25.688,56	28.067,42	29.991,63	32.049,78

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi/dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB hanya secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 kabupaten Probolinggo pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini :

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014-2018

Table 2. GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Probolinggo Regency 2014-2018

(Miliar Rp./Billion Rp.)

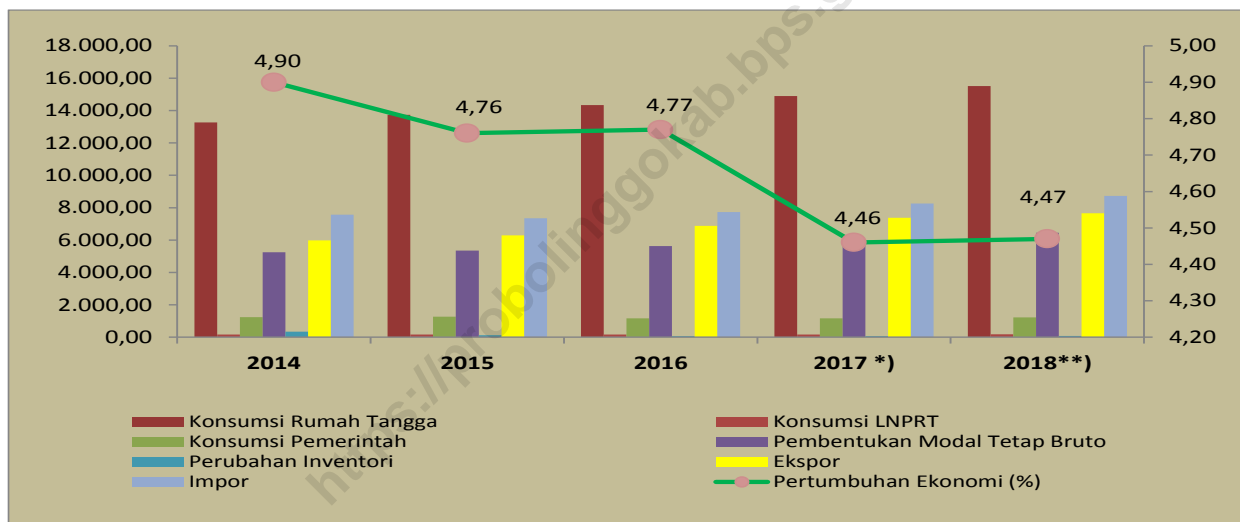
Komponen Pengeluaran/ Expenditure Item	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption	13.274,23	13.739,46	14.334,54	14.904,72	15.518,98
2. Konsumsi LNPR/NT/ NPISH Consumption	163,05	157,25	163,82	167,41	181,09
3. Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption	1.231,41	1.260,53	1.155,29	1.168,33	1.225,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	5.248,70	5.356,00	5.632,61	5.994,16	6.450,04
5. Perubahan Inventori/ Changes of Inventory	339,39	116,70	63,00	67,15	71,53
6. Ekspor/Export	5.986,71	6.294,39	6.881,45	7.380,25	7.650,22
7. Impor/Import	7.561,29	7.353,32	7.726,62	8.263,76	8.722,03
PDRB/GRDP	18.682,21	19.570,99	20.504,09	21.418,25	22.375,24

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 di kabupaten Probolinggo selalu meningkat, yakni dari sebesar 18.682,21 miliar Rupiah (2014); 19.570,99 miliar Rupiah (2015); 20.504,09 miliar Rupiah (2016); 21.418,25 miliar Rupiah (2017); dan 22.375,24 miliar Rupiah (2018). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten Probolinggo cenderung melambat, yakni dari 4,90 persen pada tahun 2014 terus melambat hingga menjadi 4,47 persen pada tahun 2018.

Namun demikian di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melambat, perekonomian kabupaten Probolinggo selama periode 2014 - 2018 masih dapat tetap

tumbuh di atas 4,40 persen, yakni masing-masing sebesar 4,90 persen (2014); 4,76 persen (2015); 4,77 persen (2016); 4,46 persen (2017); dan 4,47 persen (2018). Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, peranan dan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Industri pengolahan yang selalu konsisten tumbuh di atas 5 persen setiap tahunnya dengan peranan terhadap total PDRB di kisaran 22 persen. Sedangkan dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi kabupaten Probolinggo masih sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB setiap tahunnya.

Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018

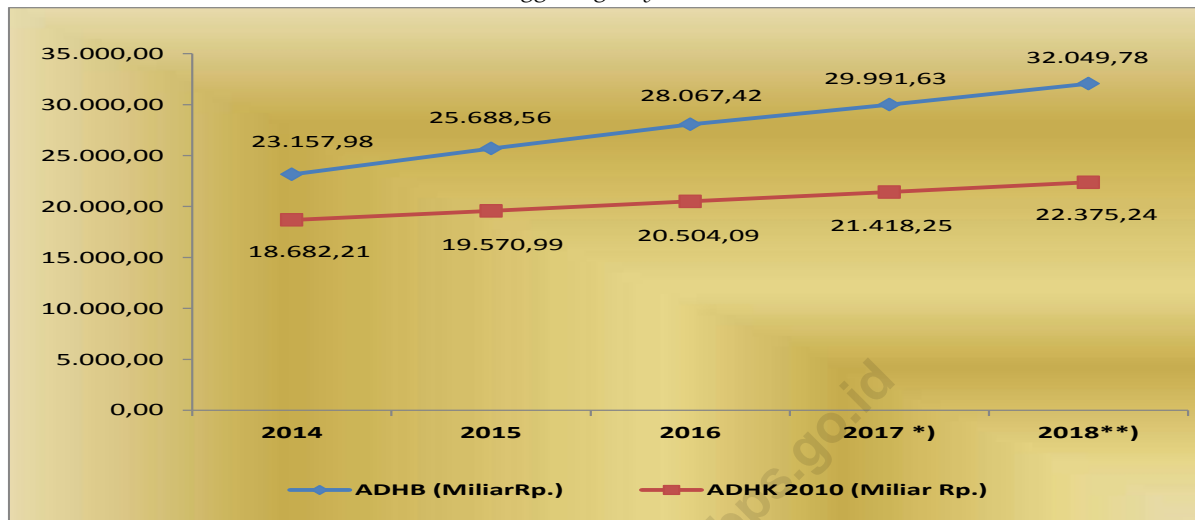


Nilai PDRB adhb yang pada umumnya lebih besar dari nilai PDRB adhk dapat dilihat pada grafik di bawah. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB adh Konstan 2010 pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai besaran PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya dengan struktur nominal PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga selalu menunjukkan peningkatan.

Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014-2018

Figure 3. Comparing of GRDP at current price and GRDP at 2010 Constant Price, Probolinggo Regency 2014-2018



Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018

Table 3. Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Probolinggo Regency 2014-2018

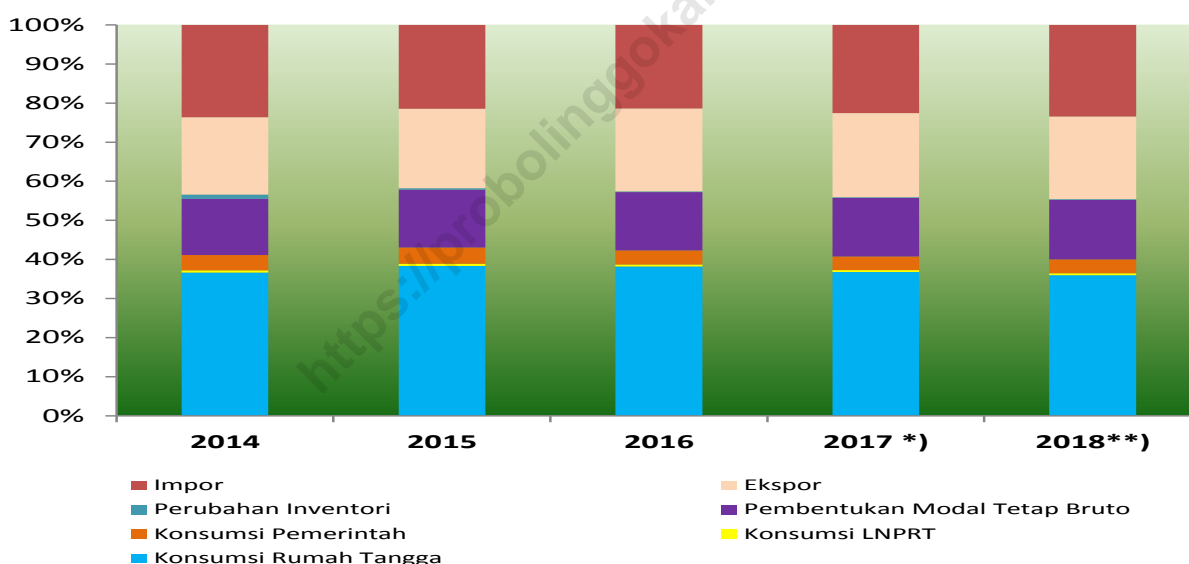
Komponen Pengeluaran/ Expenditure Item	(persen)				
	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption	69,44	67,18	66,82	67,13	67,76
2. Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption	1,00	0,94	0,92	0,91	0,95
3. Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption	7,50	7,27	6,31	6,25	6,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	27,11	25,90	26,02	27,39	28,60
5. Perubahan Inventori/ Changes of Inventory	2,19	0,70	0,35	0,35	0,37
6. Ekspor/Export	37,45	35,59	37,02	39,16	39,82
7. Impor/Import	44,68	37,59	37,45	41,20	44,12
PDRB/GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT),

Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor atas barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2014-2018, PDRB kabupaten Probolinggo yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) mencapai 66,82 hingga 69,44 persen dengan tren yang berfluktuasi. Sedangkan pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal bruto (PMTB) masih mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 25,90 sampai dengan 28,60 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 35,59 sampai dengan 39,82 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB di sepanjang periode masih berkontribusi lebih besar dibanding ekspor, yakni berkisar antara 37,45 sampai dengan 44,68 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018 (persen)



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 6,25 - 7,50 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Demikian pula dengan konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPR) kontribusinya jauh lebih kecil dibanding komponen lainnya, yaitu sekitar 0,91 - 1,00 persen.

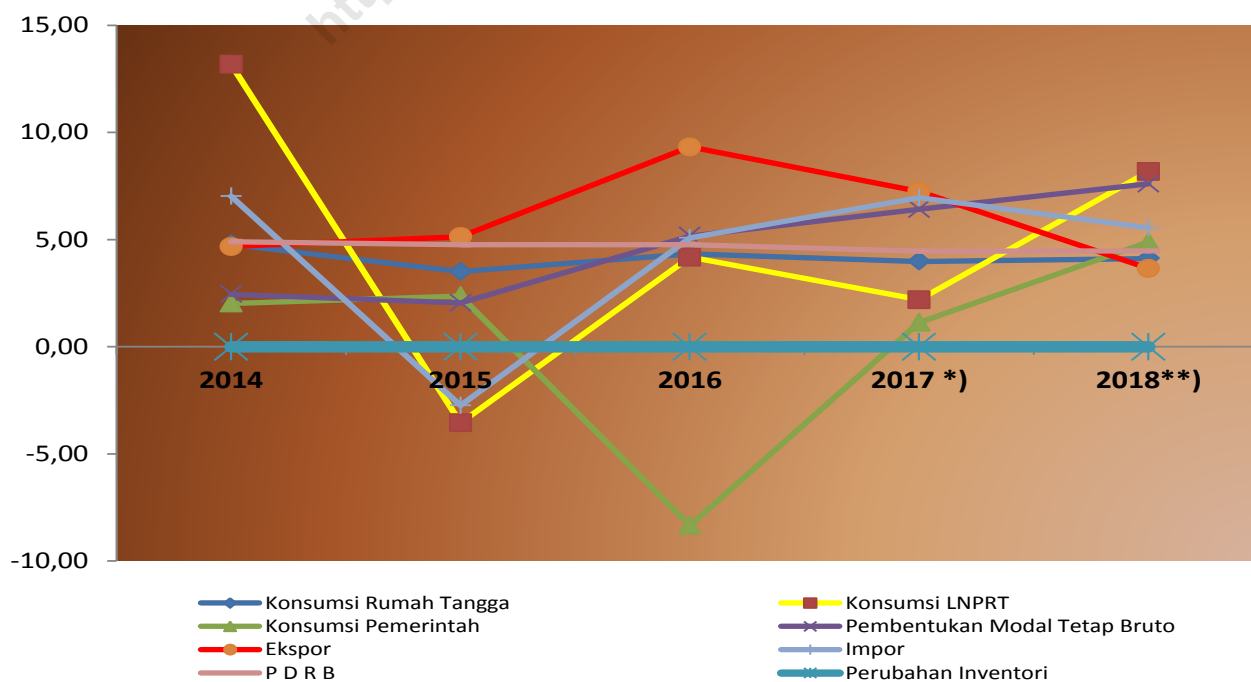
Agregat makro lain yang bisa diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2014- 2018 pertumbuhan ekonomi kabupaten Probolinggo cenderung mengalami

perlambatan, yakni dari sebesar 4,90 persen (2014); 4,76 persen (2015); 4,77 persen (2016); 4,46 persen (2017); dan 4,47 persen (2018). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018
Table 4. Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Probolinggo Regency 2014 - 2018

Komponen Pengeluaran/ Expenditure Item	(persen)				
	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption	4,78	3,50	4,33	3,98	4,12
2. Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption	13,18	-3,56	4,18	2,19	8,17
3. Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption	2,02	2,36	-8,35	1,13	4,89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation	2,45	2,04	5,16	6,42	7,61
5. Perubahan Inventori/ Changes of Inventory	-	-	-	-	-
6. Ekspor/Export	4,68	5,14	9,33	7,25	3,66
7. Impor/Import	7,02	-2,75	5,08	6,95	5,55
PDRB/GRDP	4,90	4,76	4,77	4,46	4,47

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018



Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRIT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 dan 6 akan terlihat tingkat kecepatan kenaikan harga yang dimulai dari tahun dasar (2010=100) selama periode tahun 2014 - 2018, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018
Table 5. Implicit Indices of GRDP by Expenditure, Probolinggo Regency 2014-2018

Komponen Pengeluaran/ Expenditure Item	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	121,14	125,61	130,83	135,08	139,95
2. Konsumsi LNPRIT/ <i>NPISH Consumption</i>	142,30	153,52	158,47	163,28	167,47
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	141,05	148,25	153,35	160,41	173,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	119,60	124,24	129,68	137,05	142,11
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	-	-	-	-	-
6. Ekspor/ <i>Export</i>	144,86	145,24	150,99	159,15	166,82
7. Impor/ <i>Import</i>	136,86	131,32	136,03	149,52	162,12
PDRB/GRDP	123,96	131,26	136,89	140,03	143,24

**Tabel 6. Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018**
Table 6. Implicit Indices Growth of GRDP by Expenditure, Probolinggo Regency 2014-2018

Komponen Pengeluaran/ Expenditure Item	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	3,28	3,69	4,15	3,25	3,60
2. Konsumsi LNPRIT/ <i>NPISH Consumption</i>	1,48	7,88	3,22	3,04	2,57
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	2,04	5,10	3,44	4,60	7,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	5,68	3,88	4,38	5,69	3,69
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	-	-	-	-	-
6. Ekspor/ <i>Export</i>	5,15	0,26	3,96	5,40	4,82
7. Impor/ <i>Import</i>	0,83	-4,04	3,59	9,91	8,43
PDRB/GRDP	5,97	5,89	4,29	2,29	2,29

3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah, serta sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran kabupaten Probolinggo untuk periode 2014 – 2018.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di kabupaten Probolinggo, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah kabupaten Probolinggo maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2014 s.d. 2018 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi

rumah tangga. Sehingga pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Probolinggo 2014-2018
Table 7. Trend of Using on Final Household Consumption of Probolinggo Regency 2014-2018

Uraian/ Description	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/ Total of Household Consumption					
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Miliar Rp/Trillion Rp)	16.080,78	17.258,13	18.753,47	20.133,46	21.718,25
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant Prices</i> (Miliar Rp/Trillion Rp)	13.274,23	13.739,46	14.334,54	14.904,72	15.518,98
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)/ Proportion to GRDP at current price (%)	69,44	67,18	66,82	67,13	67,76
Rata-rata konsumsi per Rumah Tangga/ Average of per Hoisehold consumption (Ribu Rp/Thousand Rp.)					
a. ADHB / <i>Current Prices</i>	50.096,66	53.544,29	57.801,86	61.668,46	66.109,78
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant Prices</i>	41.353,39	42.627,43	44.181,87	45.652,91	47.239,36
Rata-rata konsumsi per Kapita/ Average of per capita consumption (Ribu Rp./thousand Rp.)					
a. ADHB / <i>Current Prices</i>	14.196,98	15.132,34	16.335,60	17.428,34	18.688,93
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant Prices</i>	11.719,21	12.047,09	12.486,41	12.902,13	13.354,35
Pertumbuhan/Growth :					
a. Total konsumsi Rumah Tangga/ <i>Total of Household consumption</i>	-	3,50	4,33	3,98	4,12
b. Per Rumah Tangga/ <i>per Household</i>	-	3,08	3,65	3,33	3,48
c. Per kapita / <i>per capita</i>	-	2,80	3,65	3,33	3,51
Jumlah Rumah Tangga/ total of household (unit)	320.995	322.315	324.444	326.479	328.518
Jumlah penduduk (ribu jiwa)/ total of population (000 person)	1.132,69	1.140,48	1.148,01	1.155,21	1.162,09

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2014 s.d 2018 cenderung berfluktuasi. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 69,44 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 66,82 persen. Adapun besaran proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB selama periode 2014 - 2018 berturut-turut, yaitu :

69,44 persen (2014); 67,18 persen (2015); 66,82 persen (2016); 67,13 persen (2017) dan 67,76 persen (2018).

Pada masa ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, biasanya secara otomatis institusi rumah tangga berusaha memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat belum sepenuhnya membaik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik masih rendah. Kondisi semacam ini memicu turunnya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Namun demikian selama periode 2017-2018 peningkatan konsumsi rumah tangga masih lebih tinggi dibandingkan komponen yang lainnya sehingga *share* nya cenderung meningkat.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan cenderung berfluktuasi dari 4,78 persen ditahun 2014 menjadi sebesar 3,50 persen (2015) dan 4,33 persen (2016). Sedangkan pada tahun berikutnya sedikit melambat menjadi 3,98 persen (2017), dan akhirnya kembali menguat di tahun 2018 menjadi 4,12 persen. Pertumbuhan konsumsi per kapita selaras dengan pertumbuhan konsumsi total adh Konstan dari 3,90 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar 2,80 persen pada tahun 2015 dan 3,65 persen di tahun 2016. Pada tahun 2017 sedikit melambat menjadi 3,33 persen dan kembali melaju lebih pesat menjadi 3,51 persen di tahun 2018. Peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014, rata-rata rumah tangga di kabupaten Probolinggo menghabiskan dana sekitar 50,09 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 53,54 juta rupiah (2015); 57,80 juta rupiah (2016); 61,67 juta rupiah (2017); dan 66,11 juta rupiah (2018). Sementara itu, atas dasar harga Konstan 2010 selama periode 2014-2018 rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh pada kisaran 3,38 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,65 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Perkembangan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara

nilai (termasuk peningkatan kualitas). Selama periode 2014-2018 rata-rata konsumsi per kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 2,80 sampai dengan 3,65 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel 7.

Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Probolinggo 2014-2018
Table 8. Structure of Household Final Consumption Expenditure, Probolinggo Regency 2014–2018

(persen)					
Kelompok Konsumsi/ Consumption Group	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food, beverages, and tobacco</i>	37,12	36,43	35,81	35,21	34,83
b. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and footwear</i>	3,54	3,42	3,42	3,41	3,45
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	9,20	9,13	9,08	9,03	8,86
d. Kesehatan & Pendidikan/ <i>Health and education</i>	4,86	5,27	5,31	5,40	5,32
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation and culture</i>	23,03	23,18	23,30	23,43	23,75
f. Hotel & Restoran/ <i>Hotels, and restaurants</i>	17,23	17,59	18,00	18,42	18,64
g. Lainnya/ <i>Miscellaneous goods and services</i>	5,01	4,98	5,08	5,10	5,16
Total Konsumsi Rumah Tangga/ Total of Household consumption	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Struktur konsumsi akhir rumah tangga kabupaten Probolinggo dari tahun 2014-2018 adalah konsumsi makanan dan bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama dari tahun ke tahun, yaitu : 37,12 persen (2014); 36,43 persen (2015); 35,81 persen (2016); 35,21 persen (2017); dan 34,83 persen (2018). Sementara untuk kelompok pengeluaran bukan makanan tertinggi ada pada subkomponen transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yang berada pada kisaran 23 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga. Sedangkan yang terendah ada pada kelompok pakaian dan alas kaki yang hanya berada pada kisaran 3 persen. Kondisi ini dikarenakan pengeluaran untuk pembelian pakaian dan alas kaki oleh rumah tangga biasanya hanya bersifat insidental saat momen-momen tertentu saja.

Jika dilihat pola proporsi konsumsi di atas, memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Namun, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 9. Pertumbuhan Riil Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Probolinggo 2014-2018
Table 9. Growth Rate of Household Final Consumption Expenditure, Probolinggo Regency 2014 – 2018
 (persen)

Kelompok Konsumsi/ Consumption Group	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food, beverages, and tobacco</i>	1,97	1,14	2,81	2,52	3,33
Non Makanan/ <i>Non Food, beverages and tobacco</i>	6,52	4,91	5,20	4,79	4,55
b. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and footwear</i>	6,21	2,91	3,58	3,93	3,15
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	2,54	4,07	5,19	4,06	3,52
d. Kesehatan & Pendidikan/ <i>Health and education</i>	3,49	7,34	5,40	4,73	3,34
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation and culture</i>	8,34	5,91	5,52	5,39	5,80
f. Hotel & Restoran/ <i>Hotels, and restaurants</i>	7,41	3,99	5,06	5,18	3,98
g. Lainnya/ <i>Miscellaneous goods and services</i>	6,16	3,85	5,05	2,80	4,31
Total Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Total of Household consumption</i>	4,78	3,50	4,33	3,98	4,12

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan berfluktuasi, dengan masing-masing sebesar 6,52 persen (2014); 4,91 persen (2015) ; 5,20 persen (2016); 4,79 persen (2017); dan 4,55 persen (2018). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya tingkat perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini mengindikasikan terjadinya peningkatan

kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

Sementara itu tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 10 menunjukkan peningkatan harga setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Secara umum selama periode 2014 s.d. 2018 peningkatan harga (inflasi) relatif stabil. Peningkatan harga pada total konsumsi rumah tangga sebesar 3,28 persen (2014); 3,69 persen (2015) ; 4,15 persen (2016); 3,25 persen (2017); dan 3,60 persen (2018). Sementara itu untuk kelompok konsumsi makanan dari 0,59 persen (2014) menjadi 4,13 persen (2015). Kemudian pada tahun berikutnya sebesar 3,89 persen (2016); 2,98 persen (2017); dan 3,28 persen (2018).

Tabel 10. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Probolinggo 2014-2018

Table 10. Implicit Growth (Price Indices) of Household Final Consumption Expenditure Probolinggo Regency 2014-2018

Kelompok Konsumsi/ Consumption Group	(persen)				
	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food, beverages, and tobacco</i>	0,59	4,13	3,89	2,98	3,28
b. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and footwear</i>	1,00	0,78	4,89	3,21	5,53
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	5,57	2,31	2,79	2,58	2,18
d. Kesehatan & Pendidikan/ <i>Health and education</i>	1,65	8,31	3,95	4,23	2,74
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation and culture</i>	5,54	2,00	3,51	2,40	3,36
f. Hotel & Restoran/ <i>Hotels, and restaurants</i>	5,57	5,36	5,84	4,45	4,98
g. Lainnya/ <i>Miscellaneous goods and services</i>	6,06	2,71	5,38	4,86	4,74
Total Konsumsi Rumah Tangga/ Total of Household consumption	3,28	3,69	4,15	3,25	3,60

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau

mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup. Hal ini memperlihatkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah seharusnya ke depan dapat terus ditingkatkan lagi dan secara tidak langsung juga mampu meningkatkan nilai PDRB wilayah tersebut. Berdasarkan tabel 11 dapat ditunjukkan bahwa perkembangan proporsi pengeluaran lembaga non profit (LNPRT) terhadap total PDRB relatif stagnan.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Probolinggo 2014 - 2018
Table 11. Trend of NPISH Final Consumption Expenditure Probolinggo Regency 2014 - 2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	232,02	241,40	259,60	273,35	303,28
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	163,05	157,25	163,82	167,41	181,09
c. Pertumbuhan Riil (%)	13,18	-3,56	4,18	2,19	8,17
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	1,00	0,94	0,92	0,91	0,95

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2014 konsumsi LNPRT adhb sebesar 232,02 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 241,40 miliar rupiah (2015); 259,60 miliar rupiah (2016); 273,35 miliar rupiah (2017); dan 303,28 miliar rupiah (2018). Adapun pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan 2010 cenderung menunjukkan fluktuasi, berturut-turut adalah sebesar 13,18 persen (2014); minus 3,56 persen (2015); 4,18 persen (2016); 2,19 persen (2017); dan di tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 8,19 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 karena adanya kegiatan pemilihan anggota legislatif (Pileg) baik pusat maupun daerah serta pemilihan presiden (Pilpres) yang berimbas pada pengeluaran yang cukup besar bagi partai politik yang merupakan bagian dari LNPRT sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan pengeluaran konsumsi LNPRT hingga terkonstraksi sebesar minus 3,56 persen karena di tahun tersebut aktifitas LNPRT menurun drastis dan kembali ke kondisi sebagaimana biasanya.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 kecuali di tahun 2016 terjadi penurunan realisasi belanja pemerintah. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.736,93 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1.868,72 miliar rupiah (2015); 1.771,64 miliar rupiah (2016); 1.874,07 miliar rupiah (2017), dan 2.122,36 miliar rupiah (2018). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan perkembangan yang sama selama periode 2014-2018. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil juga telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Apabila dicermati lebih lanjut ternyata proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap total PDRB cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 7,27 persen (tahun 2014) hingga mencapai 6,62 persen (tahun 2018). Sepanjang periode tersebut hanya terjadi peningkatan proporsi di tahun 2018, yaitu dari 6,25 persen (2017) menjadi 6,62 persen (2018). Sehingga dengan demikian proporsi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 6,25 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 7,50 persen. Hal ini terjadi karena pada tahun 2014

terjadi peningkatan belanja modal dan belanja barang pemerintah yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun lainnya. Sedangkan di tahun 2016 penurunan proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB karena adanya penghematan besar-besaran anggaran belanja pemerintah dan penurunan jumlah pegawai yang berakibat terjadinya penurunan nominal pengeluaran konsumsi pemerintah (ADHB maupun ADHK 2010) dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun di tahun 2017 peningkatan realisasi belanja Pemerintah masih jauh lebih lambat dibandingkan peningkatan komponen lainnya.

Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1.736,93	1.868,72	1.771,64	1.874,07	2.122,36
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1.231,41	1.260,53	1.155,29	1.168,33	1.225,42
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	7,50	7,27	6,31	6,25	6,62
Rata-rata konsumsi per Kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	1.533,46	1.638,54	1.543,23	1.622,27	1.826,33
b. ADHK 2010	1.087,16	1.105,26	1.006,34	1.011,35	1.054,49
Rata-rata konsumsi per Pegawai Pemerintahan/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	162.878,18	184.802,46	180.687,91	196.299,02	231.395,42
b. ADHK 2010	115.473,69	124.656,51	117.826,35	122.376,52	133.604,20
Pertumbuhan² :					
a. Total konsumsi Pemerintah	-	2,36	-8,35	1,13	4,89
b. Per Kapita	-	1,67	-8,95	0,50	4,27
c. Per Pegawai	-	7,95	-5,48	3,86	9,17
Jumlah Pegawai (<i>orang</i>)	10.664	10.112	9.805	9.547	9.172
Jumlah penduduk (<i>000 jiwa</i>)	1.132,69	1.140,48	1.148,01	1.155,21	1.162,09

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara

langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1.533,46 ribu rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi : 1.638,54 ribu rupiah (2015); 1.543,23 ribu rupiah (2016); 1.622,27 ribu rupiah (2017); dan mencapai 1.826,33 ribu rupiah pada tahun 2018.

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 1.087 ribu rupiah (2014); 1,105 ribu rupiah (2015); 1.006 ribu rupiah (2016); 1.011 ribu rupiah (2017); dan 1.054 ribu rupiah (2018). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah per kapita secara kuantitas kecuali di tahun 2016, dengan laju pertumbuhan dimulai tahun 2014 sebesar 1,17 persen. Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita mencapai 1,67 persen (2015); -8,95 persen (2016); 0,50 persen (2017); dan 4,27 persen (2018).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah (data jumlah pegawai meliputi pegawai daerah, polisi, militer dan pegawai pusat) sebesar 162.878 ribu rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing sebesar 184.802 ribu rupiah (2015); 180.687 ribu rupiah (2016); 196.299 ribu rupiah (2017); dan 231.395 ribu rupiah (2018).

Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat menonjol terjadi pada tahun 2015 dan 2018 masing-masing sebesar 7,05 persen dan 9,17 persen akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2016 hingga mencapai -5,48 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) kecuali di tahun 2016. Hal ini relatif tidak sejalan dengan jumlah pegawai pemerintah yang cenderung menurun. Pada periode tahun 2014 s.d 2018 jumlah pegawai pemerintah (pegawai daerah, polisi, militer, dan pegawai pusat) menurun dengan jumlah pada masing-masing tahun sebesar 10.664 orang (2014); 10.112 orang (2015); 9.805 orang (2016); 9.547 orang (2017); dan 9.172 orang (2018).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan

masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan 2018, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun tumbuh sebesar 2,36 persen dan 4,89 persen; dan untuk konsumsi per-kapita sebesar 1,67 persen dan 4,27 persen; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada tahun 2015 dan 2018 yaitu sebesar 7,95 persen dan 9,17 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁶. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	6.277,26	6.654,36	7.304,36	8.215,13	9.165,96
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5.248,70	5.356,00	5.632,61	5.994,16	6.450,04
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	27,11	25,90	26,02	27,39	28,60
Struktur PMTB (ADHB)					
a. Bangunan (Miliar Rp.)	3.532,68	3.758,56	4.256,56	4.894,94	5.547,55
(%)	56,28	56,48	58,27	59,58	60,52
b. Non Bangunan (Miliar Rp.)	2.744,58	2.895,80	3.047,80	3.320,20	3.618,41
(%)	43,72	43,52	41,73	40,42	39,48
Total PMTB (Miliar Rp.)	6.277,26	6.654,36	7.304,36	8.215,13	9.165,96
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%) :					
a. Bangunan	0,83	3,44	6,04	7,49	8,80
b. Non Bangunan	4,54	0,31	4,05	5,03	6,02
Total PMTB	2,45	2,04	5,16	6,42	7,61

⁶ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Pengelompokan komponen PMTB pada penghitungan PDRB pengeluaran tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014–2018 cenderung meningkat dari 2,45 persen di tahun 2014 menjadi 2,04 persen di tahun 2015, sementara di tahun-tahun berikutnya konsisten meningkat masing-masing sebesar 5,16 persen (2016); 6,42 persen (2017); dan 7,61 persen (2018). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2018, hal ini disebabkan oleh masih banyaknya aktifitas pembangunan konstruksi di tahun tersebut (utamanya yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan jalan tol), juga dipengaruhi oleh peningkatan pembentukan modal dalam bentuk ternak, mesin, dan kendaraan bermotor.

Jika dilihat pertumbuhannya, masing-masing komponen PMTB pertumbuhannya sedikit bervariasi setiap tahunnya. Pertumbuhan sub komponen bangunan maupun non bangunan mempunyai pola yang relatif sama hanya berbeda di awal periode. Pada tahun 2014 pertumbuhan sub komponen bangunan sebesar 0,83 persen dan meningkat di 2015 menjadi 3,44 persen. Kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 6,04 persen dan terus meningkat lebih cepat pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 7,49 persen dan 8,80 persen. Sedangkan sub komponen Non Bangunan pada tahun 2014 tumbuh jauh lebih tinggi daripada Bangunan, yaitu sebesar 4,54 persen. Akan tetapi di tahun 2015 tumbuh jauh lebih lambat sebesar 0,31 persen dan kembali meningkat di tahun 2016 dengan tumbuh sebesar 4,05 persen. Kemudian selalu meningkat di dua tahun berikutnya, yaitu sebesar 5,03 persen di tahun 2017 dan 6,02 persen di tahun 2018. Jadi secara umum selama kurun waktu tahun 2014-2018 pertumbuhan PMTB relatif meningkat, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai besaran angka 7,61 persen dan terendah terjadi pada tahun 2015 yang hanya tumbuh sebesar 2,04 persen.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi, ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping

komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Probolinggo, 2014 - 2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Inventori					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	506,45	180,76	98,86	106,00	117,39
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	339,39	116,70	63,00	67,15	71,53
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,19	0,70	0,35	0,35	0,37

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2014 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 506,45 miliar rupiah, yang kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 180,76 miliar rupiah dan 2016 turun menjadi sebesar 98,86 miliar rupiah. Pada tahun 2017 perubahan inventori mencapai 106,0 miliar rupiah dan terakhir di tahun 2018 mencapai 117,39 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di kabupaten Probolinggo mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2014, proporsi perubahan inventori adalah sebesar 2,19 persen, selanjutnya turun menjadi 0,70 persen (2015); 0,35 persen (2016); 0,35 persen (2017); dan 0,37 persen (2018). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh perubahan populasi ternak dan luas areal tanaman pangan yang belum menghasilkan pada akhir dibanding awal tahun 2015 lebih tinggi dibanding tahun-tahun lainnya.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi kabupaten Probolinggo, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 15. Perkembangan Ekspor Kabupaten Probolinggo, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	8.672,62	9.141,87	10.390,39	11.745,33	12.762,36
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5.986,71	6.294,39	6.881,45	7.380,25	7.650,22
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	37,45	35,59	37,02	39,16	39,82
Pertumbuhan Riil (%)	4,68	5,14	9,33	7,25	3,66

Secara total dalam kurun waktu 2014-2018 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2014 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 8.672,62 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 9.141,87 miliar rupiah pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 nilai ekspor barang dan jasa masing-masing sebesar 10.390,39 miliar rupiah; 11.745,33 miliar rupiah; dan 12.762,36 miliar rupiah.

Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga terus menunjukkan peningkatan nominal dengan tingkat kecepatan yang berfluktuasi. Nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 masing-masing tahun sebesar 5.986,71 miliar rupiah (2014); 6.294,39 miliar rupiah (2015); 6.881,45 miliar rupiah (2016); 7.380,25 miliar rupiah (2017); dan 7.650,22 miliar rupiah (2018). Sementara itu pada periode 2014 s.d 2018, proporsi nilai Ekspor terhadap PDRB juga cenderung mengalami fluktuasi dari 37,45 persen pada tahun 2014 kemudian 35,59 persen (2015); 37,02 persen (2016); 39,16 persen (2017); dan 39,82 persen di tahun 2018. Angka ini tentu berkaitan dengan kecepatan perkembangan besaran nilai ekspor dibanding komponen lainnya.

Pertumbuhan riil total ekspor beberapa tahun mencapai angka yang tinggi diatas angka pertumbuhan total PDRB, yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017, dengan masing-masing tahun

mencapai 5,14 persen; 9,33 persen; dan 7,25 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan produksi beberapa komoditas industri pengolahan (industri makanan) yang cukup baik dan lonjakan jumlah wisatawan luar daerah maupun asing yang masuk ke kabupaten Probolinggo pada tahun tersebut yang memicu peningkatan nilai ekspor. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 4,68 persen (2014); dan 3,66 persen (2018).

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik kabupaten Probolinggo. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan, yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*residen*) kabupaten Probolinggo di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan kabupaten Probolinggo terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 16. Perkembangan Impor Kabupaten Probolinggo, 2014-2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	10.348,08	9.656,69	10.510,91	12.355,72	14.139,82
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	7.561,29	7.353,32	7.726,62	8.263,76	8.722,03
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	44,68	37,59	37,45	41,20	44,12
Pertumbuhan Riil (%)	7,02	-2,75	5,08	6,95	5,55

Data pada tabel 16 menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa kabupaten Probolinggo cenderung menunjukkan peningkatan (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2014 s.d 2018 seiring peningkatan kebutuhan domestik. Pada tahun 2014 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 10.348,08 miliar rupiah, kemudian menurun di tahun 2015 menjadi 9.656,69 miliar rupiah; kembali meningkat menjadi 10.510,91 miliar rupiah pada tahun 2016; dan kembali meningkat pada tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing mencapai 12.355,72 miliar rupiah dan 14.139,82 miliar rupiah. Tidak demikian dengan proporsinya terhadap total PDRB yang cenderung mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2014 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 44,68 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa menurun menjadi 37,59 persen dan 37,45 persen pada tahun 2015 dan tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017-2018 proporsi impor barang dan jasa terhadap total PDRB terus meningkat masing-masing sebesar 41,20 persen dan 44,12 persen.

BAB IV

**PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB PENGELUARAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

2014 - 2018

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Probolinggo, Tahun 2014 – 2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	23.157,98	25.688,56	28.067,42	29.991,63	32.049,78
b. ADHK 2010	18.682,21	19.570,99	20.504,09	21.418,25	22.375,24
PDRB per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	20.445,12	22.524,34	24.448,71	25.961,97	27.579,38
b. ADHK 2010	16.493,66	17.160,31	17.860,52	18.540,50	19.254,27
Pertumbuhan Riil PDRB per Kapita (%)	4,03	4,04	4,08	3,81	3,85
Jumlah penduduk (000 jiwa)	1.132,69	1.140,48	1.148,01	1.155,21	1.162,09
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,84	0,69	0,66	0,63	0,60

Berdasarkan Tabel 17 dapat diketahui peningkatan PDRB per kapita kabupaten Probolinggo dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu

menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 3 hingga 4 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita di tahun 2014 mencapai 4,03 persen dan terus melambat hingga mencapai 3,85 persen di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta akan selalu diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 0,60 – 0,84 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2. PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara nilai produk yang dikonsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah di wilayah domestik dengan total PDRB yang tercipta. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB kabupaten Probolinggo (sekitar 66 s.d 69 persen), artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah kabupaten Probolinggo sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 18. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo 2014 -2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (Miliar Rp)					
<i>a. Rumah Tangga</i>	16.080,78	17.258,13	18.753,47	20.133,46	21.718,25
<i>b. LNPRT</i>	232,02	241,40	259,60	273,35	303,28
<i>c. Pemerintah</i>	1.736,93	1.868,72	1.771,64	1.874,07	2.122,36
Jumlah	18.049,73	19.368,25	20.784,71	22.280,88	24.143,89
PDRB ADHB (Miliar Rp)	23.157,98	25.688,56	28.067,42	29.991,63	32.049,78

Proporsi (%)	77,94	75,40	74,05	74,29	75,33
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Data di tabel 18 menunjukkan bahwa pada tahun 2014, produk yang digunakan untuk total konsumsi akhir sebanyak 77,94 persen dari total PDRB yang tercipta. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya proporsi konsumsi akhir domestik terhadap PDRB terus menurun perlahan, berturut-turut sebesar 75,40 persen (2015); 74,05 persen (2016); 74,29 persen (2017); dan 75,33 persen (2018). Ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Selama periode 2014–2018 proporsi perbandingan konsumsi akhir terhadap total PDRB yang tercipta menunjukkan kecenderungan menurun perlahan. Secara implisit data tersebut menjelaskan bahwa walaupun nilai konsumsi akhir dan PDRB semakin meningkat namun peningkatan nilai PDRB sedikit lebih cepat. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, penurunan rasio tersebut juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan PDRB yang sedikit lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi akhir domestik.

4.3. PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah (kabupaten/negara). Untuk menghasilkan peningkatan produk yang di ekspor kemungkinan besar ditunjang dengan menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 19. Rasio Ekspor Terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2014–2018

Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor ADHB (Miliar Rp)	8.672,62	9.141,87	10.390,39	11.745,33	12.762,36
Total PMTB ADHB (Miliar Rp)	6.277,26	6.654,36	7.304,36	8.215,13	9.165,96
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,38	1,37	1,42	1,43	1,39

Selama tahun 2014-2018, ekspor selalu mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB namun demikian rasio ekspor terhadap PMTB mempunyai kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun (tabel 19). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk untuk

ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

4.4. PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah/negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 20 menunjukkan rasio PDRB terhadap impor selama tahun 2014 - 2018 cenderung berfluktuasi dari sebesar 2,24 pada tahun 2014; 2,66 (2015); 2,67 (2016); 2,43 (2017); dan kembali mengalami penurunan menjadi 2,27 di tahun 2018. Penurunan rasio menunjukkan ketergantungan PDRB terhadap produk impor yang semakin meningkat.

Tabel 20. Rasio PDRB Terhadap Total Impor Kabupaten Probolinggo, Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHB (Miliar Rp)	23.157,98	25.688,56	28.067,42	29.991,63	32.049,78
Total Impor ADHB (Miliar Rp)	10.348,08	9.656,69	10.510,91	12.355,72	14.139,82
Rasio PDRB Terhadap Impor	2,24	2,66	2,67	2,43	2,27

4.5. KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari tabel 21 dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar kabupaten, dengan rentang 27 s.d 30 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan

masyarakat domestik terus meningkat setiap tahunnya, dari 33.506,07 miliar rupiah (2014) menjadi sebesar 46.189,60 miliar rupiah (2018).

**Tabel 21. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kabupaten Probolinggo, Tahun 2014 – 2018**

U r a i a n	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	23.157,98	25.688,56	28.067,42	29.991,63	32.049,78
(%)	69,12	72,68	72,75	70,82	69,39
Total Impor ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	10.348,08	9.656,69	10.510,91	12.355,72	14.139,82
(%)	30,88	27,32	27,25	29,18	30,61
<u>Total Permintaan</u>					
(<i>Miliar Rp</i>)	33.506,07	35.345,25	38.578,33	42.347,35	46.189,60
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik sebesar 23.157,98 miliar rupiah di tahun 2014 dan terus meningkat menjadi 32.049,78 miliar rupiah di tahun 2018. Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan akhir domestik, maka berbagai produk barang dan jasa dilakukan impor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 10.348,08 miliar rupiah (2014); 9.656,69 miliar rupiah (2015); 10.510,91 miliar rupiah (2016); 12.355,72 miliar rupiah (2017); dan 14.139,82 miliar rupiah (2018).

4.6. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio

tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga, maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2014 - 2018 posisi perdagangan barang dan jasa kabupaten Probolinggo dengan luar wilayah (kabupaten/negara) selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menggambarkan neraca perdagangan barang dan jasa kabupaten Probolinggo cenderung dalam posisi defisit. Selama tahun 2014-2018 defisit perdagangan kabupaten Probolinggo masing-masing tercatat sebesar -1.675,46 miliar rupiah (2014); -514,82 miliar rupiah (2015); -120,53 miliar rupiah (2016); -610,39 miliar rupiah (2017); dan -1.377,45 miliar rupiah (2018).

Tabel 22. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2014 – 2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	8.672,62	9.141,87	10.390,39	11.745,33	12.762,36
Nilai Impor ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	10.348,08	9.656,69	10.510,91	12.355,72	14.139,82
Net Ekspor (X-M) (<i>Miliar Rp</i>)	-1.675,46	-514,82	-120,53	-610,39	-1.377,45
Rasio Ekspor Terhadap Impor	0,84	0,95	0,99	0,95	0,90

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung berfluktuasi selama periode tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 dan 2015 rasionya masing-masing sebesar 0,84 dan 0,95. Kemudian meningkat menjadi 0,99 pada tahun 2016; dan terus menurun menjadi 0,95 di tahun 2017 dan 0,90 pada tahun 2018.

4.7. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 23. Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2014-2018

U r a i a n	2014	2015	2016	2017 *)	2018**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK2010 (Miliar Rp)	18.682,21	19.570,99	20.504,09	21.418,25	22.375,24
Perubahan (Miliar Rp)	873,32	888,78	933,09	914,16	956,99
PMTB ADHK2010 (Miliar Rp)	5.248,70	5.356,00	5.632,61	5.994,16	6.450,04
ICOR	6,01	6,03	6,04	6,56	6,74

Berdasarkan tabel 23 bisa dilihat bahwa selama periode 2014 s.d. 2018 besaran ICOR cenderung meningkat dari sebesar 6,01 (2014) menjadi 6,03 (2015). Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 nilai ICOR masing-masing meningkat menjadi 6,04 dan 6,56. Selanjutnya terus meningkat lebih cepat menjadi 6,74 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa laju peningkatan produksi domestik didominasi oleh sektor-sektor yang padat modal sehingga membutuhkan belanja modal/kapital yang lebih mahal.

<https://probelingankes.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2014 s.d 2018 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi kabupaten Probolinggo pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2014 s.d 2018, sehingga lebih mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi kabupaten Probolinggo terhadap ekonomi luar daerah.

<https://probelinggaokab.bps.go.id>

BAB VI

LAMPIRAN

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Probolinggo
Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)**

Komponen	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16.080.776,7	17.258.128,6	18.753.467,0	20.133.458,4	21.718.252,2
	1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5.969.628,8	6.286.928,8	6.715.148,8	7.089.369,4	7.565.392,5
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	568.807,9	589.907,9	640.907,9	687.468,7	748.361,1
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.479.727,5	1.575.430,6	1.703.430,6	1.818.172,5	1.923.264,9
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	781.834,3	908.964,3	995.964,3	1.087.228,1	1.154.403,7
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3.703.776,7	4.001.094,7	4.370.213,1	4.716.392,2	5.157.498,5
	1.f. Hotel dan Restoran	2.770.697,5	3.035.748,2	3.375.748,2	3.708.556,7	4.048.128,5
	1.g. Lainnya	806.304,0	860.054,0	952.054,0	1.026.270,7	1.121.203,0
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	232.015,5	241.403,0	259.603,0	273.353,0	303.278,5
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.736.933,0	1.868.722,5	1.771.645,0	1.874.066,7	2.122.358,8
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.277.265,0	6.654.363,3	7.304.363,3	8.215.134,2	9.165.955,4
	a. Bangunan	3.532.682,3	3.758.563,2	4.256.563,2	4.894.938,0	5.547.545,4
	b. Non-Bangunan	2.744.582,7	2.895.800,1	3.047.800,1	3.320.196,2	3.618.410,0
5	Perubahan Inventori	506.454,2	180.764,5	98.864,5	106.001,8	117.389,4
7	Ekspor	8.672.623,2	9.141.867,7	10.390.387,0	11.745.332,3	12.762.363,1
8	Impor	10.348.084,8	9.656.686,8	10.510.912,3	12.355.719,4	14.139.815,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		23.157.982,7	25.688.562,8	28.067.417,5	29.991.627,1	32.049.782,1

*) = Angka Sementara

***) = Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Probolinggo
Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)**

Komponen	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13.274.232,7	13.739.460,5	14.334.542,8	14.904.717,7	15.518.979,5
	1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4.935.100,7	4.991.134,9	5.131.386,6	5.260.564,1	5.435.600,2
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	484.773,1	498.867,3	516.719,0	537.026,0	553.949,7
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.261.644,1	1.312.963,6	1.381.098,6	1.437.119,5	1.487.718,2
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	608.837,2	653.538,7	688.854,1	721.429,9	745.556,8
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3.191.075,1	3.379.711,5	3.566.396,0	3.758.530,0	3.976.612,6
	1.f. Hotel dan Restoran	2.100.243,1	2.184.003,1	2.294.528,3	2.413.358,7	2.509.374,4
	1.g. Lainnya	692.559,3	719.241,3	755.560,3	776.689,4	810.167,5
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	163.046,2	157.246,3	163.820,9	167.408,6	181.089,3
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.231.411,4	1.260.526,6	1.155.287,4	1.168.328,6	1.225.417,7
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.248.701,7	5.355.996,4	5.632.610,0	5.994.158,0	6.450.036,9
	a. Bangunan	2.904.176,6	3.004.176,6	3.185.599,7	3.424.095,9	3.725.257,0
	b. Non-Bangunan	2.344.525,0	2.351.819,8	2.447.010,2	2.570.062,1	2.724.779,9
5	Perubahan Inventori	339.394,3	116.698,9	62.998,9	67.145,5	71.528,7
7	Ekspor	5.986.712,2	6.294.386,9	6.881.450,9	7.380.252,8	7.650.218,2
8	Impor	7.561.289,7	7.353.322,3	7.726.624,2	8.263.764,5	8.722.033,6
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		18.682.208,8	19.570.993,3	20.504.086,7	21.418.246,7	22.375.236,6

*) = Angka Sementara

***) = Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2018 (Persen)

Komponen	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	69,44	67,18	66,82	67,13	67,76
	1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	25,78	24,47	23,93	23,64	23,61
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,46	2,30	2,28	2,29	2,33
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,39	6,13	6,07	6,06	6,00
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,38	3,54	3,55	3,63	3,60
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	15,99	15,58	15,57	15,73	16,09
	1.f. Hotel dan Restoran	11,96	11,82	12,03	12,37	12,63
	1.g. Lainnya	3,48	3,35	3,39	3,42	3,50
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,00	0,94	0,92	0,91	0,95
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,50	7,27	6,31	6,25	6,62
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,11	25,90	26,02	27,39	28,60
	a. Bangunan	15,25	14,63	15,17	16,32	17,31
	b. Non-Bangunan	11,85	11,27	10,86	11,07	11,29
5	Perubahan Inventori	2,19	0,70	0,35	0,35	0,37
7	Ekspor	37,45	35,59	37,02	39,16	39,82
8	Impor	44,68	37,59	37,45	41,20	44,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) = Angka Sementara

**) = Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo
Tahun 2014-2018 (Persen)**

Komponen	Uraian	2014	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,78	3,50	4,33	3,98	4,12
	1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,97	1,14	2,81	2,52	3,33
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6,21	2,91	3,58	3,93	3,15
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,54	4,07	5,19	4,06	3,52
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,49	7,34	5,40	4,73	3,34
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,34	5,91	5,52	5,39	5,80
	1.f. Hotel dan Restoran	7,41	3,99	5,06	5,18	3,98
	1.g. Lainnya	6,16	3,85	5,05	2,80	4,31
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13,18	-3,56	4,18	2,19	8,17
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,02	2,36	-8,35	1,13	4,89
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,45	2,04	5,16	6,42	7,61
	a. Bangunan	0,83	3,44	6,04	7,49	8,80
	b. Non-Bangunan	4,54	0,31	4,05	5,03	6,02
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
7	Ekspor	4,68	5,14	9,33	7,25	3,66
8	Impor	7,02	-2,75	5,08	6,95	5,55
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,90	4,76	4,77	4,46	4,47

*) = Angka Sementara

**) = Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo
Tahun 2014-2018**

Komponen	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	121,14	125,61	130,83	135,08	139,95
	1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	120,96	125,96	130,86	134,76	139,18
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	117,33	118,25	124,03	128,01	135,10
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	117,29	119,99	123,34	126,52	129,28
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	128,41	139,08	144,58	150,70	154,84
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	116,07	118,39	122,54	125,49	129,70
	1.f. Hotel dan Restoran	131,92	139,00	147,12	153,67	161,32
	1.g. Lainnya	116,42	119,58	126,01	132,13	138,39
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	142,30	153,52	158,47	163,28	167,47
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	141,05	148,25	153,35	160,41	173,19
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	119,60	124,24	129,68	137,05	142,11
	a. Bangunan	121,64	125,11	133,62	142,96	148,92
	b. Non-Bangunan	117,06	123,13	124,55	129,19	132,80
5	Perubahan Inventori	149,22	154,90	156,93	157,87	164,12
7	Ekspor	144,86	145,24	150,99	159,15	166,82
8	Impor	136,86	131,32	136,03	149,52	162,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		123,96	131,26	136,89	140,03	143,24

*) = Angka Sementara

**) = Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2018 (Persen)

Komponen	Uraian	2014	2015	2016	2017 *)	2018 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,28	3,69	4,15	3,25	3,60
	1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	0,59	4,13	3,89	2,98	3,28
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,00	0,78	4,89	3,21	5,53
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,57	2,31	2,79	2,58	2,18
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,65	8,31	3,95	4,23	2,74
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,54	2,00	3,51	2,40	3,36
	1.f. Hotel dan Restoran	5,57	5,36	5,84	4,45	4,98
	1.g. Lainnya	6,06	2,71	5,38	4,86	4,74
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,48	7,88	3,22	3,04	2,57
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,04	5,10	3,44	4,60	7,97
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,68	3,88	4,38	5,69	3,69
	a. Bangunan	6,26	2,85	6,80	6,99	4,17
	b. Non-Bangunan	5,00	5,18	1,15	3,72	2,79
5	Perubahan Inventori	32,89	3,80	1,31	0,60	3,96
7	Ekspor	5,15	0,26	3,96	5,40	4,82
8	Impor	0,83	-4,04	3,59	9,91	8,43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,97	5,89	4,29	2,29	2,29

*) = Angka Sementara

**) = Angka Sangat Sementara



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PROBOLINGGO

Jl. Lumajang Km. 5 Sumbertaman Probolinggo

Telp. /Fax : (0335) 422117

Email : bps3513@bps.go.id

Homepage : <https://probolinggokab.bps.go.id>